

PLURALISME AGAMA DI SEKOLAH; STUDI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH

Nurhafid Ishari

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

E-mail: hafid.ishari@gmail.com

Abstrak: Pendidikan di sekolah adalah sarana pengembangan pribadi manusia untuk dapat menjadi manusia yang mampu bersanding dengan manusia lainnya dalam bingkai kedamaian. Harus diakui bahwa pendidikan umum, seperti lembaga pendidikan menengah yang merangkul berbagai macam peserta didik dengan berbagai macam latar belakang agama maupun etnis. Perbedaan latar belakang agama dan etnis yang terdapat pada masing-masing individu masyarakat sekolah tersebut kemudian disikapi, disadari serta diterima dengan ketulusan hati, sehingga melahirkan sebuah masyarakat sekolah yang harmonis. Salah satu perubahan dari pendidikan agama pada kurikulum 2013 adalah ditematkannya budi pekerti sebagai bagian integral dari pendidikan agama. Sehingga, pendidikan agama dalam kurikulum 2013 bernama Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sayangnya, tidak ditemukan alasan utama dari dimasukkannya kata “budi pekerti” dalam pendidikan agama. Namun, nampaknya ada keinginan yang sangat kuat dari penyusun kurikulum 2013 untuk memasukkan aspek etika dan perilaku dalam kurikulum 2013.

Kata kunci: pluralisme agama, sekolah, pendidikan Islam, kurikulum 2013

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari sisi budaya, etnis, bahasa, dan agama. Dari sisi agama, di negara ini hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, tumbuh dan berkembang pula berbagai aliran atau kepercayaan lokal yang jumlahnya tidak kalah banyak. Pada sensus tahun 2010, Religious Demography di Indonesia menunjukkan 213 juta jiwa penganut agama yang berbeda dengan komposisi 88.2% pemeluk Islam, 5.9% Kristen, 3.1% Katolik, 1.8% Hindu, 0.8% Buddha, dan 0.2% agama serta kepercayaan lainnya. Pada Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 juga masih menunjukkan angka yang hampir sama, yaitu pemeluk Islam (88.58%), Kristen (5.79%), Katolik (3.08%), Hindu (1.73%), Buddha (0.60%), Khonghucu (0.10%), dan

lainnya (0.12%).¹ Sensus demographi keagamaan terakhir yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa dari total 237. 641. 326 penduduk Indonesia mayoritas 87.8% adalah muslim diikuti Kristen-Katolik 10%, Hindu 2%, Budha 0.72%, Konghucu 0.05% dan lainnya 0.50%.²

Data tersebut mengungkapkan bahwa penduduk beragama Islam merupakan mayoritas secara nasional, namun tidak demikian dalam sebaran perpropinsi atau kabupaten/kota. Agama-agama tertentu lainnya menunjukkan jumlah mayoritas penduduk di propinsi tertentu seperti Hindu di Bali serta Kristen di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Komposisi jumlah penduduk Islam dan Kristen cukup berimbang di Maluku. Sedangkan di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara penduduk Kristen merupakan minoritas tetapi dengan jumlah signifikan.

Kemajemukan agama tersebut pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya dan memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, kemajemukan bisa pula berpotensi mencuatkan social conflict antarumat beragama yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama bila kemajemukan tersebut tidak disikapi dan dikelola secara baik.³ Dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia tersebut, maka pluralisme agama beragama dalam pengertian kesediaan umat beragama hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain merupakan isu penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Namun, wacana pluralisme agama telah menuai banyak tanggapan dari masyarakat, baik masyarakat kalangan intelektual maupun non intelektual. Puncaknya pada tanggal 29 juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat menerbitkan keputusan fatwa berkenaan pluralisme, liberalisme dan sekulerisme adalah haram bagi

¹ Amiruddin al Rahab. "Kekerasan Komunal di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum" dalam *Jurnal Dignitas*. Vol. V, No. 1 Tahun 2008, 34.

² Dalam Tim Puslitbang Kemenag, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012* (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2013), 13.

³ Muhammad Hisyam et.al, *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik* (Jakarta: LIPI Press. 2006.), 1.

umat Islam yang menganut atau mengikuti paham pluralisme.⁴ Atas fatwa tersebut banyak memunculkan silang pendapat di setiap kalangan, baik kaum intelektual maupun non intelektual. Bagi mereka yang pro atas fatwa MUI tersebut beranggapan bahwa pluralisme agama dapat membunuh identitas bagi setiap pemeluk agama masing-masing. Sedangkan bagi yang kontra terhadap fatwa MUI berpendapat bahwa pluralisme agama dapat dijadikan sebagai jembatan agar terciptanya dialog lintas agama sehingga angka konflik berbasis agama dapat dikurangi.

Banyak hal yang mesti dibenahi, tetapi paling tidak upaya pemeliharaan atau pemulihan keharmonisan hubungan sosial dan kerukunan umat beragama yang sempat terusik akibat konflik SARA beberapa tahun belakangan, dipandang perlu melibatkan semua komponen masyarakat secara komprehensif dan integratif, baik pada arah nasional maupun lokal. Pemecahan yang diasumsikan tentu saja berlandaskan pada dinamika obyektif masyarakat itu sendiri sesuai struktur yang berkembang secara aktual. Karena itu concern dan kerjasama instansi-instansi terkait serta pemberdayaan lembaga dan pemimpin agama dan masyarakat mutlak perlu dilakukan.⁵

Pendidikan di sekolah adalah sarana pengembangan pribadi manusia untuk dapat menjadi manusia yang mampu bersanding dengan manusia lainnya dalam bingkai kedamaian. Harus diakui bahwa pendidikan umum, seperti lembaga pendidikan menengah yang merangkul berbagai macam peserta didik dengan berbagai macam latar belakang agama maupun etnis. Perbedaan latar belakang agama dan etnis yang terdapat pada masing-masing individu masyarakat sekolah tersebut kemudian disikapi, disadari serta diterima dengan ketulusan hati, sehingga melahirkan sebuah masyarakat sekolah yang harmonis. Akan tetapi, sebenarnya kesadaran akan

⁴ Dalam surat keputusan fatwa MUI Nomor: 7/Munas VII/mui/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme Agama menetapkan fatwa haram didasarkan atas dua ketentuan. Pertama, berdasarkan ketentuan umum pluralisme yang dimaksud dalam fatwa ini adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengkalim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Kedua, berdasarkan ketentuan hukum pluralisme yang dimaksud pada ketentuan umum adalah bertentangan dengan ajaran Islam. (surat keputusan fatwa MUI terkait Pluralisme, Liberalisme dan Sekulerisme bisa diunduh di [Http://:www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)).

⁵ H. M. Atho Mudzhar dkk, *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), 16.

kemajemukan itu seharusnya tidak hanya ada pada guru atau staf pengajar saja, melainkan juga harus ditanamkan pada diri setiap peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya tahu bahwa mereka hidup dalam kemajemukan agama, tapi mereka juga mengetahui nilai-nilai yang tersembunyi di balik realitas pluralisme agama di sekolahnya dan pada gilirannya mereka mampu mengaktualisasikannya dalam bentuk perilaku sehari-hari.

Sejauh ini, usaha pengaktualisasian nilai-nilai kemanusiaan yang dikembangkan di sekolah-sekolah umum, relatif sama, yaitu dengan menambahkan muatan kurikulum kelompok mata pelajaran estetika, dan belum diarahkan sepenuhnya pada pembentukan pribadi peserta didik yang pluralis. Peserta didik hanya dididik dan diarahkan untuk dapat saling menghormati, sementara mereka tidak memahami secara mendalam akan arti nilai saling menghormati tersebut. Tidak salah jika mereka terkadang saling menghargai, tapi ketika mendengar isu-isu yang tak bertanggung jawab, mereka juga dapat bertindak anarkis, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Hal inilah yang mungkin belum disadari oleh lembaga pendidikan secara umum, sehingga sampai saat ini lembaga pendidikan selalu menjadi sorotan ketika terjadi berbagai fenomena tindak kekerasan di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dan tergugah untuk melakukan penelitian tentang proses pengaktualisasian nilai-nilai pluralisme agama yang terdapat pada lembaga pendidikan umum, dengan harapan dapat mengungkap nilai-nilai di balik realita pluralisme agama di sekolah tersebut.

Salah satu perubahan dari pendidikan agama pada kurikulum 2013 adalah ditematkannya budi pekerti sebagai bagian integral dari pendidikan agama. Sehingga, pendidikan agama dalam kurikulum 2013 bernama Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sayangnya, tidak ditemukan alasan utama dari dimasukkannya kata “budi pekerti” dalam pendidikan agama. Namun, nampaknya ada keinginan yang sangat kuat dari penyusun kurikulum 2013 untuk memasukkan aspek etika dan perilaku dalam kurikulum 2013. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana gambaran tentang budi pekerti yang dimaksudkan oleh perumus kurikulum pendidikan agama? Jika di beberapa sekolah yang menerapkan mata pelajaran budi pekerti, seperti

Sekolah Taman Siswa, pendidikan budi pekerti merujuk pada penggalian terhadap budaya lokal (baca: adat, tradisi). Namun kurikulum 2013 menem patkan nilai-nilai agama sebagai rujukan dari budi pekerti. Ini menunjukkan peran lain agama. Padahal agama merupakan landasan keilmuan, maka dalam pelajaran pendidikan agama, nilai-nilai agama menjadi landasan etika dan perilaku siswa.

Mengenai Pendidikan Agama Islam (PAI), jika dibandingkan dengan kurikulum KTSP, kurikulum PAI 2013 banyak memuat materi-materi baru. Khususnya dalam pendidikan agama Islam kelas X, materi baru tersebut cenderung menonjolkan penegasan identitas keislaman, seperti: (a) keharusan untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an, hadits, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, (b) mengatur cara berpakaian, serta (c) revitalisasi dakwah. Ketiga materi tersebut tidak ditemukan dalam KTSP. Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, kurikulum KTSP hanya menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Dalam kurikulum 2013, sumber hukum Islam hanya dibatasi pada tiga sumber: al- Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama terdahulu. Hal ini dapat mengarah kepada reduksi dan pendangkalan kekayaan khazanah keislaman yang bisa terjebak pada eksklusivisme dan kemandegan berpikir. Hal tersebut akan berdampak pada penolakan terhadap adanya interpretasi ulang atas persoalan terdahulu serta upaya reaktualisasi ajaran Islam dalam menjawab problem kekinian.

Di samping itu, kurikulum 2013 PAI juga mengatur tentang perilaku, khususnya mengenai cara berpakaian yang islami dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Kurikulum 2013 yang sangat terperinci dan memberikan ruang yang sangat sempit terhadap kemungkinan adanya perbedaan penafsiran, maka dapat dipastikan bahwa Kurikulum 2013 kurang memberikan ruang terhadap perbedaan pandangan dalam Islam mengenai cara berpakaian, khususnya mengenai batasan aurat yang harus ditutup. Terkait dengan revitalisasi dakwah, kurikulum 2013 menegaskan sifat agama Islam sebagai agama misi. Materi dakwah dalam kurikulum KTSP hanya berkaitan dengan sejarah dakwah Nabi pada masa periode Madinah dan Makkah, sedangkan kurikulum 2013 berbicara lebih jauh mengenai bagaimana seharusnya dakwah dilakukan dalam konteks kekinian.

Pendidikan agama yang merupakan sarana utama dan dengannyalah nilai-nilai agama diperkenalkan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat adalah bagian daripada kebutuhan masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai, tentram dan religius. Di samping itu pendidikan agama yang menciptakan iklim, suasana atau bahkan rangsangan untuk mengalami atau menghayati nilai-nilai tertentu. Lewat pengajaran dan penghayatan, pendidikan agama berusaha membina mentalitas iman dalam diri para penganutnya. Mentalitas adalah inti yang mengendalikan pribadi manusia. Dengan mentalitas iman, setiap penganut agama dapat melihat situasi hidup, menilai situasi hidup dan menentukan sikap dalam situasi hidup tersebut. Pada sisi itu, pendidikan agama sebagai upaya pengenalan dan pemahaman terhadap agama, serta sebagai proses internalisasi nilai-nilai menjadi penting untuk diangkat. Pendidikan ini hendaknya menjadi perhatian semua orang: kaum pendidik, tokoh agama, dan intelektual sehingga pendidikan agama bisa memunculkan keberagaman yang bersifat pencerahan bagi umat manusia, serta menjadi rahmat bagi sekalian alam sebagaimana tujuan agama itu sendiri.

Pluralisme Agama

Pada saat ini sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab dalam *Islam Inklusif*, bahwa umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah fenomena nyata.⁶

Pluralisme agama dalam hal ini, harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi "*misinterpretation*" maupun "*misunderstanding*".

Bertolak dari akar kata yang pertama yaitu pluralisme, kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata "plural" yang berarti banyak atau majemuk. Atau meminjam definisi Martin H. Manser dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary*: "Plural (form of a word) used of referring to more than one".⁷ Sedangkan dalam Kamus

⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka* (Bandung: Mizan, 1999), 39.

⁷ Marsen, Martin H, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Third Edition (Oxford University, 1999), 329

Ilmiah Populer, pluralisme berarti: “Teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi”.⁸

Secara bahasa, pluralisme berasal dari kata pluralism berarti jama’ atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansional termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak.⁹

Dalam hal ini beberapa tokoh juga mendefinisikan pluralisme dalam berbagai pendapatnya antara lain: Menurut Alwi Shihab, pengertian pluralisme dapat disimpulkan menjadi 4 yaitu:

1. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut.
2. Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Dalam hal ini Kosmopolitanisme menunjuk suatu realitas di mana aneka ragam ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Maksudnya walaupun suatu ras dan bangsa tersebut hidup berdampingan tetapi tidak ada interaksi sosial.
3. Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Paham relativisme menganggap “semua agama adalah sama”.
4. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut.¹⁰

Selanjutnya menurut Moh. Shofan pluralisme adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman

⁸Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 604.

⁹ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 75.

¹⁰ Shihab, *Islam Inklusif*, 41-42.

sosial lainnya. Karenanya, pluralisme bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis.¹¹

Sementara itu Syamsul Ma'arif mendefinisikan pluralisme adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Dan dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut, umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.¹²

Dari beberapa definisi di atas dikatakan bahwa pluralisme merupakan suatu faham tentang kemajemukan yang mana terdapat beraneka ragam ras dan agama yang hidup berdampingan dalam suatu lokasi. Di sini pluralisme tidak hanya sekedar hidup berdampingan tanpa mempedulikan orang lain. Hal itu membutuhkan ikatan, kerjasama, dan kerja yang nyata. Ikatan komitmen yang paling dalam, perbedaan yang paling mendasar dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama dari pluralisme.

Pengertian Pluralisme Agama

Setelah mengetahui berbagai definisi pluralisme, maka akan didapat pengertian pluralisme agama adalah suatu sikap membangun tidak saja kesadaran normatif teologis tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Selain itu, pluralisme agama juga harus dipahami sebagai pertalian sejati dalam kebhinekaan.

Menurut Nurcholis Madjid, pluralism agama dapat diambil melalui tiga sikap agama yaitu sikap eksklusif, inklusif dan sikap pluralis.¹³

Selanjutnya menurut Nurcholis Madjid yang dikutip Rachman, mengatakan bahwa pluralisme agama tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, berdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme agama

¹¹Moh. Shofan, *Mengakankan Pluralisme: Fundamentalisme- Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (Jakarta: LSAF, 2008), 87.

¹² Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 17.

¹³ Nurcholis Madjid, *Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia. Dalam Jalan Baru*, editor Mark R. Woodward (Bandung: Mizan, 1998), 56.

harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan- ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bond of civility*).¹⁴

Sementara itu menurut Alwi Shihab pluralisme yaitu tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan.¹⁵

Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas bahwa pluralisme agama merupakan *sunnatullah* yang tidak akan bisa dirubah atau diingkari. Karenanya pluralisme harus diamalkan berupa sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati antar umat beragama guna tercapainya kerukunan umat beragama dan terjalin pertalian sejati kebhinekaan.

Latar Belakang Munculnya Pluralisme Agama

Setelah dunia Islam menjadi negara-negara merdeka pasca perang dunia I dan perang dunia II, ada beberapa masalah yang perlu tanggapan segera dari pemimpin dan tokoh umat Islam. Selain yang menyangkut hubungan antara Agama dan negara (*din wan daulah*), ada pula masalah yang berhubungan dengan tatanan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik dan organisasi masyarakat. Faktor tersebutlah salah satu yang melatarbelakangi munculnya pluralisme agama karena banyaknya konflik-konflik yang muncul setelah banyak perpecahan baik dalam Agama, budaya dan tatanan masyarakat itu sendiri.¹⁶

Yang melatar belakangi kemunculan pluralism memang tidak terlalu jauh membahas tentang keanekaragaman dan konflik internal agama. Dalam pergaulan antar agama dewasa ini, memang semakin hari semakin merasakan intensnya pertemuan agama- agama itu. Pada tingkat pribadi, sebenarnya hubungan antar tokoh-tokoh agama di Indonesia pada khususnya, kita melihat suasana yang semakin akrab, penuh toleransi, dengan keterlibatan yang sungguh- sungguh dalam usaha memecahkan persoalan- persoalan hubungan antar agama yang ada di dalam masyarakat. Tetapi pada

¹⁴ Budi Munawar Rachman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.

¹⁵ Shihab, *Islam Inklusif*, 41.

¹⁶ Samsul Rizal Panggabean, *Sumber Daya Keagamaan dan Kemungkinan Pluralisme dalam Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

tingkat teologis yang merupakan dasar dari agama itu muncul kebingungan-kebingungan, khususnya menyangkut bagaimana kita harus mendefinisikan diri di tengah agama-agama lain yang juga eksis dan punya keabsahan. Dalam persoalan ini di diskusikanlah apakah ada kebenaran dalam agama lain yang implikasinya adalah berakar dalam pertanyaan teologis yang sangat mendasar. Faktor tersebutlah yang paling utama melatarbelakangi munculnya pluralisme.

Sebab-sebab lain lahirnya teori pluralisme banyak dan beragam, sekalipun kompleks. Namun secara umum dapat di klasifikasikan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal (ideologis) dan faktor eksternal, yang mana antara satu faktor dan faktor lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan erat. Faktor internal merupakan faktor yang timbul akibat tuntutan akan kebenaran yang mutlak (absolute truthclaims) dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah maupun dalam masalah keyakinan atau doktrin. Faktor ini sering juga di namakan dengan faktor ideologis. Adapun faktor yang timbul dari luar dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu faktor sosio-politis dan faktor ilmiah.¹⁷

1. Faktor ideologis (internal). Faktor internal di sini yaitu mengenai masalah teologi.

Keyakinan seseorang yang serba mutlak dan absolut dalam apa yang di yakini dan di imaninnya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tak ada yang mempertentangkannya hingga muncul teori tentang relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama.¹⁸

2. Faktor eksternal.

Faktor eksternal terbagi menjadi dua macam yaitu faktor Sosio-politik dan faktor keilmuan.

a. Faktor Sosio-Politis

Dimana faktor yang mendorong munculnya teori pluralisme agama adalah berkembangnya wacana-wacana sosio-politis, demokratis dan nasionalisme yang telah melahirkan sistem negara-bangsa dan kemudian mengarah pada apa yang dewasa ini di kenal dengan globalisasi, yang

¹⁷ Anis Malik Thoaha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2006), 24.

¹⁸ Thoaha, *Tren*, 24-40.

merupakan hasil praktis dari sebuah proses sosial dan politis yang berlangsung selama kurang lebih tiga abad.¹⁹

b. Faktor Keilmuan atau Ilmiah

Pada hakikatnya terdapat banyak faktor keilmuan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Namun yang memiliki kaitan langsung dengan timbulnya teori-teori pluralisme agama adalah maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap agama-agama dunia, atau yang sering juga di kenal dengan studi perbandingan agama. Evolusi politik dan ekonomi telah memberikan pengaruh yang sebanding terhadap evolusi sosial budaya begitu juga sebaliknya. Di antara keduanya terdapat hubungan implikatif dan timbal balik.²⁰

Dari presentasi dan analisis di atas dapat kita lihat pengaruh yang jelas dari kajian-kajian “ilmiah” perbandingan agama dalam perkembangan teori-teori pluralisme agama. Akhirnya, sampai batas tertentu dapat disimpulkan, bahwa munculnya gagasan pluralisme agama modern dengan berbagai tren dan bentuknya, memberi gambaran fakta yang telanjang betapa besarnya usaha Barat yang liberal dan sekuler untuk menjadi dominandan hegemonik bahkan dalam pemikiran dan teologi keagamaan. Sekulerisme yang kini mendominasi peradaban Barat telah berhasil mengubah kristen untk menyebarkan gagasan pluralisme agama (apakah mereka sungguh-sungguh menerimanya atau tidak, perkara lain lagi).

Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan term terpenting dan menentukan dalam perubahan masyarakat. Bahkan Islam sendiri menempatkan pendidikan dalam posisi vital. Bukan sebuah kebetulan jika dalam lima ayat pertama di mulai dengan perintah membaca. Tak heran jika dalam syiar yang dikembangkan Nabi Muhammad dilakukan dengan pendekatan pendidikan.²⁰

Gagasan utama pendidikan termasuk pendidikan Islam, terletak pada pandangan bahwa setiap manusia mempunyai nilai positif tentang kecerdasan, daya

¹⁹ Thoha, *Tren*, 41.

²⁰ Husni Rahim, *Arab Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 5.

kreatif, keterampilan kerja, dan keluhuran budi. Namun fokusnya bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid tetapi juga akhlak sosial dan kemanusiaan. Kualitas akhlak pun tak bisa dicapai hanya dengan doktrin halal-haram, tetapi usaha budaya dari rumah, masyarakat, dan ruang kelas.²¹

Pengertian pendidikan Islam ini sebetulnya sudah cukup banyak dikemukakan oleh para ahli. Meskipun demikian, perlu dicermati dalam rangka melihat relevansi rumusan. Baik dalam hubungan makna, tujuan, fungsi maupun proses kependidikan Islam yang dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan umat manusia sekarang ini.

Ahmad D. Marimba menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.²² Muhammad Atiya al-Abrashi berpendapat pendidikan Islam ialah mendidik akhlak dan jiwa peserta didik, menanamkan rasa kesopanan yang tinggi dan mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang ikhlas dan jujur.²³

Selanjutnya menurut Muhammad Fadhil al-Jamali yang dikutip Abdul Mujib mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.²⁴

Sedangkan hakikat pendidikan Islam menurut M. Arifin adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.²⁵

Rekomendasi Konferensi Internasional Pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz Jeddah tahun 1997 mendefinisikan pendidikan Islam sebagai keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah *ta'lim*, *tarbiyah*, dan *ta'dib*. Berdasarkan

²¹ Rahim, *Arab Baru*, 7.

²² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1989), 23.

²³ Muhammad Atiya al-Abrashi, *Education In Islam* (Cairo: The Supreme Council For Islamic Affairs, 1963), 11-12.

²⁴ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 26.

²⁵ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 32.

pemaknaan ini, Abdurrahman al-Nahlawy menyimpulkan bahwa pendidikan Islam terdiri dari empat unsur yaitu: *pertama*, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh. *Kedua*, mengembangkan seluruh potensi. *Ketiga*, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan. *Keempat*, dilaksanakan secara bertahap.²⁶

Dari beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan di atas, tampak sekali umumnya penekanan utama diberikan kepada pentingnya pembentukan akhlak, disamping adanya penekanan persoalan fitrah, dan upaya manusia dalam mencapai hidup makmur dan bahagia sesuai dengan ajaran dan norma Islam.

Tugas dan Fungsi Pendidikan Islam

Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini maka tugas dan fungsi yang perlu di emban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya.

Menurut H.M Arifin, fungsi pendidikan Islam ialah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan bersifat struktural dan institusional.²⁷ Dilanjut menurut Hujair AH. Sanaky, tugas dan fungsi pendidikan Islam adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada manusia seoptimal mungkin, sehingga dapat berkembang menjadi manusia muslim yang baik atau insan kamil.²⁸

Menurut Achmadi fungsi pendidikan Islam adalah:

1. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga denganya akan timbul kemauan mmbaca (analisis), akan mengembangkan kreatifitas dan produktifitas.
2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual maupun sosial, lebih bermakna.

²⁶ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Alikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 31-32.

²⁷ H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

²⁸ Hujar AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003), 128.

3. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu maupun sosial.²⁹

Dari beberapa definisi di atas, bahwa tugas pendidikan Islam ialah mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik dengan se optimal mungkin sehingga menjadi manusia yang baik. Sedangkan fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan yang bersifat struktural dan institusional.

Tujuan Pendidikan Islam

Jika kita berbicara tentang tujuan pendidikan Islam, berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak Islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idealitas Islami. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Sifat-sifat dasar manusia.
3. Tuntutan masyarakat dan dinamika peradaban kemanusiaan.
4. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dalam aspek ini setidaknya ada 3 macam dimensi ideal Islam, yaitu:
 - a. Mengandung nilai yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di muka bumi.
 - b. Mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.
 - c. Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat.³⁰

²⁹ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 35.

³⁰ Arifin Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 109.

Berdasarkan rumusan di atas dapat difahami, bahwa pendidikan Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah peserta didik secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta yang demikian, peserta didik diharapkan akan mampu memadukan fungsi iman, ilmu, dan amal. Secara integral bagi terbinanya kehidupan yang harmonis, baik dunia maupun akhirat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari paparan di atas adalah pluralism muncul atas dasar lahirnya kemajemukan berbagai agama di dunia. Hal yang paling mendasar dalam pluralism adalah sikap toleransi terhadap berbagai agama yang ada, sehingga perbedaan-perbedaan dapat dimaklumi sebagai keberagaman yang harus diterima oleh semua pemeluk agama. Dalam dunia pendidikan Islam pluralisme mempunyai pengertian bahwa perbedaan yang lahir atas dasar agama merupakan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat memecah persatuan antar umat beragama. Di sekolah-sekolah khususnya yang ada di Indonesia sering dicontohkan bagaimana sikap pluralism ditanamkan agar para peserta didik memahami bahwa kemajemukan adalah bagian dari kehidupan, sehingga kerukunan antar umat beragama dapat selalu terjaga.

Referensi

- Achmadi, 2005. *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al Rahab, Amiruddin. 2008. "Kekerasan Komunal di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum" *Jurnal Dignitas*. Volume V No. 1
- Al-Abrashi, Muhammad Atiya, 1963. *Education In Islam*. Cairo: The Supreme Council For Islamic Affairs
- Arifin M., 1994. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara
- Arifin, H.M.1996, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi 2005, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Renika Cipta

- Atho Mudzhar, H. M. dkk, 2004. *Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI
- Hisyam et.al, Muhammad. 2006. *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik*. Jakarta: LIPI Press
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Ma'arif, Syamsul, 2005. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Jogjakarta: Logung Pustaka,
- Madjid, Nurcholis. 1998. *mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modrn: Pengalaman Indonesia. Dalam Jalan Baru*, editor Mark R. Woodward, Bandung: Mizan
- Marimba, Ahmad D. 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al-Ma'arif
- Marsen, Martin H, 1999. *Oxford Learner's Pocket Dictionary, (Oxford University, Third Edition*
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mujib, Abdul, 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana
- Muzayyin, Arifin. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi, 2008. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer
- Rachman, Budi Munawar. 2001. *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina
- Rizal, Samsul dan Panggabean. 2001. "Sumber Daya Keagamaan dan Kemungkinan Pluralisme" *Dalam Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,¹
- Thoha, Anis Malik. 2006. *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif
- Sanaky, Hujar AH. 2003, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insani Press
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka* (Bandung: Mizan
- Shofan, Moh. 2008. *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme- Konservatif di Tubuh Muhammadiyah*, Jakarta: LSAF

Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya